

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

Thoyib Wahyudin

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya Jawa Barat, Indonesia

Email: toya.thea@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 21 Februari 2021 Direvisi 2 Maret 2021 Disetujui 15 Maret 2021	<i>The purpose of this research is the implementation of the 2020 work plan policy in the department of communication, informatics, statistics and persandian Pangandaran Regency. The research used is Qualitative Research with a Descriptive Method approach. The implementation of the 2020 work plan policy in the Department of Communication, Informatics, Statistics and Persandian Pangandaran Regency, obtained the fact that at the implementation stage is still not supported by technical instructions in the form of Standard Operational Procedures in carrying out various activities that are the responsibility of each field and also the implementation of the work plan is more dominant depending on the Budget Implementation List or Budget Work Plan. Implementation of policies that have not been optimal, especially related to disposition factors, namely the placement of employees according to special skills and incentives. As for other factors relatively good enough, although it needs improvement in some aspects such as the same understanding of employees on the implementation of tasks, delegation of authority and division of duties. In terms of resources the number of employees is still felt inadequate and competence also needs to be improved, as well as the communication aspect must be more optimal so that there are similar understandings and actions to support the smooth implementation of tasks. The implementation of the 2020 work plan policy at the Department of Communication, Informatics, Statistics and Persandian Pangandaran district is arguably quite well run, although there are still variables or factors of policy implementation that have not been optimal, especially related to disposition factors, namely the placement of employees in accordance with special skills and incentives</i>
Keywords: <i>implementation of the 2020 work plan policy in the communication office; informatics; statistics; persandian pangandaran district</i>	
	ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah Implementasi kebijakan rencana kerja tahun 2020 di dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Pangandaran. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan Penelitian

Kualitatif dengan pendekatan menggunakan Metode Deskriptif. Implementasi kebijakan rencana kerja tahun 2020 di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, diperoleh kenyataan bahwa pada tahap pelaksanaan masih kurang didukung oleh petunjuk teknis berupa Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawab setiap bidang dan juga pelaksanaan rencana kerja lebih dominan tergantung pada Daftar Pelaksanaan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran. Implementasi kebijakan yang belum optimal, terutama yang berhubungan dengan faktor disposisi, yaitu penempatan pegawai sesuai keahlian dan insentif khusus. Sedangkan untuk faktor-faktor lain relatif sudah cukup baik, meskipun perlu peningkatan pada beberapa aspek seperti pemahaman yang sama dari pegawai terhadap pelaksanaan tugas, pelimpahan kewenangan dan pembagian tugas. Pada aspek sumber daya jumlah pegawai masih dirasakan belum memadai dan kompetensinya juga perlu lebih ditingkatkan, demikian pula pada aspek komunikasi harus lebih optimal sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Implementasi kebijakan rencana kerja tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran bisa dibilang cukup berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat variabel atau faktor implementasi kebijakan yang belum optimal, terutama yang berhubungan dengan faktor disposisi, yaitu penempatan pegawai sesuai keahlian dan insentif khusus.

Kata Kunci: implementasi kebijakan rencana kerja tahun 2020 di dinas komunikasi; informatika; statistik; persandian kabupaten pangandaran

Corresponden Author

Email: toya.thea@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



Pendahuluan

Pemerintah daerah, termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten dan Kota, diberi keleluasaan atau wewenang dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, namun semua kebijakan ataupun program kegiatan harus mengacu dan tetap mendukung program nasional, dengan kata lain kewenangan tersebut tidak berarti menjadi raja kecil di daerah namun tetap sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Djaenur, 2012).

Konsekuensi dari semua itu, daerah dalam melakukan atau menyusun rencana

pembangunan harus dilakukan sesuai koridor yang ada, memperhatikan ketentuan dan mekanisme teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan menjadi penting mengingat amanah bangsa ini berorientasi pada pembangunan nasional yang menyeluruh, pembangunan di daerah adalah pendukung utama sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan pusat menjadi satu hal yang paling perlu mendapat perhatian (Sigalingging & Warjio, 2014).

Penyelenggaraan pembangunan di daerah tidak serta merta begitu saja namun

melalui proses yang panjang yaitu perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun n harus sudah dimulai pada tahun $n-2$ waktu yang diperlukan memang cukup panjang jadi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun ini adalah hasil proses perencanaan yang dimulai dua tahun kebelakang (Purwanti & Haryono, 2015). Dinamika pembangunan pada tataran global, nasional dan lokal telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kondisi ini menjadi salah satu akibat atau manfaat dari penerapan sistem pemerintahan yang lebih semakin desentralistik (Ananda, 2018). Tahap selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemampuan setiap daerah untuk memberikan respon yang seimbang terhadap berbagai dinamika perubahan yang terjadi. Kemampuan untuk merespon berbagai perubahan tersebut sangat tergantung pada kapasitas aparatur pemerintah yang menjalankan berbagai fungsi pemerintahan baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah daerah dengan perangkatnya yakni instansi-instansi yang menangani beragam sektor pembangunan merupakan sebuah organisasi besar yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Instansi pemerintah sebagai sebuah organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama secara formal juga terikat dalam suatu wadah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan yang tidak terduga sebelumnya, sehingga selalu terbuka ruang untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki atau menyesuaikan perencanaan dengan kondisi nyata yang terjadi. Hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah ketika menyusun perencanaan, apabila dipaksakan

dan tidak sesuai dengan keadaan saat ini maka kemungkinan besar tujuan perencanaan tidak akan tercapai sebagaimana yang diinginkan.

Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari potensi yang dimiliki, terutama berkaitan dengan sumber daya yang ada. Selain itu pula pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan karakteristik atau kondisi daerah bersangkutan, sehingga dalam mewujudkan tujuan yang tepat sasaran diperlukan suatu perencanaan yang baik (Thahir, 2019).

Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada penyediaan supra struktur dan infra struktur saja, akan tetapi diarahkan pula terhadap optimalisasi fungsi pelayanan dan peningkatan pertanggungjawaban pengadministrasian pelaksanaan berbagai kebijakan guna mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan tugas dan fungsi pemerintah (Sukowati, 2010).

Aspek penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus diakomodir dalam perencanaan, sehingga tidak terjadi ketimpangan terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan, boleh jadi aspek infrastruktur cukup baik namun segi pelayanan terbengkalai atau bidang-bidang lain ketinggalan jauh, meskipun bukan urusan wajib namun harus tetap mendapat perhatian, karena kebutuhan daerah dan masyarakat dari beragam aspek perlu dipenuhi dengan baik.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan ialah merupakan satu kesatuan tindakan atau tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat

di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya ditegaskan mekanisme dalam menyusun perencanaan pembangunan dilakukan melalui proses partisipatif yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) yang melibatkan semua pelaku pembangunan. Pada umumnya pada tataran pemerintahan kabupaten/kota sudah mengenal penyusunan rencana untuk kepentingan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, kegiatan ini diawali dari tingkat desa, diangkat ke tingkat kecamatan dan terakhir di tingkat kabupaten.

Pada hakekatnya pembangunan adalah suatu proses mengembangkan kualitas masyarakat untuk jangka panjang, dengan demikian diperlukan ketepatan dan keakuratan dari sebuah perencanaan yang disusun dengan memperhatikan waktu, tempat dan proses pembangunan dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan kehidupan perekonomian dan sosial secara terus menerus. Dalam arti lain penyusunan perencanaan untuk kepentingan pembangunan harus dapat memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Irwansyah & Rusniati, 2012).

Pembangunan yang dilaksanakan sudah tentu melalui suatu proses secara berkesinambungan, hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan yang baik harus melalui perencanaan matang dan dilaksanakan oleh semua pihak secara konsisten. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat dipisahkan dari adanya perencanaan akurat, untuk itu proses perencanaan menjadi kunci suksesnya suatu pembangunan, sehingga aktor kunci dalam penyusunan perencanaan pembangunan haruslah mampu memprediksi atau menerawang kedepan kemungkinan dan dampak yang akan muncul akibat suatu

pembangunan, apakah akan membawa perubahan atau kurang memberi dampak atau bahkan malah menimbulkan kemunduran.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan pendekatan menggunakan Metode Deskriptif.

Metode ini fokus pada satu variabel yang diteliti tidak membandingkan dengan variabel lain, sehingga cenderung lebih mudah atau tidak terlalu kompleks karena peneliti tidak perlu mengkaji dan melakukan analisa terhadap hubungan variabel yang diteliti dengan variabel lainnya. Metode deskriptif diarahkan untuk memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya masalah yang terjadi pada subyek atau obyek penelitian dan sifatnya adalah memberikan gambaran dari kejadian-kejadian atau fakta yang ditemukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pengamatan, wawancara maupun studi pustaka atau dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan reduksi data yaitu melakukan penajaman, penggolongan dan pengkategorian dalam kriteria yang telah ditetapkan dari data yang didapatkan, selanjutnya display atau penyajian data diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam memahami susunan atau pola hubungan dari setiap data yang diperoleh, selanjutnya membuat kesimpulan dan verifikasi.

Perencanaan yang baik menjadi salah satu dasar bagi terwujudnya keberhasilan pembangunan.

Organisasi sebagai suatu wadah merupakan tempat bagi setiap individu untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, didalamnya terdapat unsur kerjasama berlandaskan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Salah satu tujuan dibentuknya organisasi adalah untuk meringankan pencapaian tujuan dari

anggotanya, organisasi terwujud untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan anggotanya yang mempunyai motif pribadi melalui keseimbangan dengan pencapaian tujuan organisasi secara umum (Fachruddin, 2016). Pembentukan organisasi dalam hakekatnya menjadi bagian integral dari kondisi masyarakat secara menyeluruh, artinya bahwa dalam tingkatan masyarakat selalu ada organisasi. Sebagaimana dikemukakan (Siagian, 2008) bahwa organisasi selalu merupakan "sub sistem" dari negara, bangsa juga masyarakat secara keseluruhan.

Mengenai pengertian organisasi (Siagian, 2008) mengatakan: Setiap bentuk persekutuan antara dua orang yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sementara (Moenir, 2002) menyatakan bahwa pembentukan organisasi tidak lepas dari:

- a. Organisasi sebagai wadah kerjasama
- b. Organisasi dimaksudkan sebagai alat mencapai tujuan bersama
- c. Organisasi dimaksudkan menjadi suatu sistem dengan sifat-sifat yang ada. Sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang merupakan subsistem yang dapat bergerak serentak, mengikuti irama mekanisme yang teratur dan terkoordinasi.

Menurut (D. Silalahi, 2003) organisasi ialah struktur hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Menurut (Djarmiko, 2005) menyebutkan: "Organisasi ialah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama."

Kedua definisi tersebut memberikan gambaran yang hampir sama, yakni dalam organisasi selalu identik dengan sekelompok orang yang saling bekerjasama secara terstruktur dimana masing-masing anggotanya mempunyai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Seperti diungkapkan (Nawawi, 2005) bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

Manajemen sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan organisasi, mengatur tata kerja dan memberikan arah serta mengendalikan kegiatan organisasi, sebagai mana dikemukakan (Sule & Saefullah, 2005) menyebutkan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

(U. Silalahi, 2002) manajemen adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan dengan mengatur orang-orang untuk mencapai tujuan.

Kegiatan suatu organisasi diawali oleh adanya perencanaan, sehingga dapat dikatakan perencanaan menjadi salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh (Badrudin, 2015) perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lainnya.

(Puspoprano, 2006a) perencanaan merupakan fungsi manajemen yang primer, mendahului dan menjadi dasar atau fondasi dari fungsi-fungsi manajer dalam mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan.

Dikatakan oleh (Brantas, 2009): "Perencanaan adalah fungsi dasar atau fungsi fundamental dari manajemen, karena fungsi-fungsi yang lain juga harus terlebih dahulu direncanakan."

Dalam kaitannya dengan manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang sangat mendasar bagi suatu organisasi dan

berpengaruh terhadap fungsi-fungsi lainnya, semua berawal dari perencanaan.

(Ulber, 2011) perencanaan sering dikatakan sebagai fungsi utama manajemen sebab ia menetapkan dasar-dasar untuk semua fungsi manajemen lain, perencanaan yang baik akan lebih memudahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

(Nawawi, 2005) mengungkapkan: Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting bagi lingkungan organisasi, esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien.

Dikatakan oleh (Ulber, 2011) perencanaan adalah : “kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi, finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan.”

Mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien merupakan salah satu tujuan dibuatnya perencanaan, penetapan tujuan disesuaikan dengan mekanisme penyusunan anggaran, mekanisme kegiatan, waktu pelaksanaan dan pengaturan pegawai sehingga aktivitas organisasi semakin terarah.

Dikemukakan (Fahmi, 2011) perencanaan adalah pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada hakekatnya perencanaan merupakan usaha untuk menerapkan tujuan, baik berupa tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang disertai dengan menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan dimaksud.

(Saebani, 2012) perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha mencapai tujuan.

Program-program disusun sedemikian rupa melalui perencanaan, tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan pelaksanaannya termasuk teknis penyelenggaraan berbagai kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, semua berawal dari perumusan perencanaan. Tanpa adanya perencanaan kemungkinan besar organisasi akan gagal mencapai tujuan, sehingga segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dengan baik.

Menurut (Terry, 2003): Perencanaan merupakan sesuatu pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa mendatang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Perencanaan tidak dibuat untuk kepentingan masa lalu, namun analisa yang dilakukan terhadap data-data faktual digunakan untuk kepentingan masa yang akan datang melalui perkiraan-perkiraan yang relevan dengan kondisi yang ada, sehingga berdasar hal tersebut dapat disusun berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki.

(Siswanto, 2011) perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan dibuat untuk menciptakan efektivitas dalam kegiatan-kegiatan suatu organisasi, sebagai sebuah sistem organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan dimaksud perlu

memperhatikan waktu pelaksanaan, pencapaian target kerja dan kualitas hasil yang diharapkan.

Menurut (Manullang, 2009) perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program, dari alternatif yang ada.

Memperhatikan definisi tersebut, perencanaan adalah tanggungjawab pimpinan, namun meskipun demikian pegawai sebagai bawahan dapat membantu pimpinan untuk memberikan pertimbangan terhadap pemilihan tujuan yang ingin diwujudkan.

Menurut (Sucahyo, 2011) perencanaan menekankan pada apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya, perencanaan melibatkan perumusan tujuan dan cara mencapainya.

Diartikan (Wiludjeng, 2007) perencanaan adalah proses membandingkan, menilai, memilih alternatif yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Perencanaan merupakan suatu proses yang dibutuhkan dalam suatu organisasi, dapat dikatakan tidak ada organisasi yang menyelenggarakan kegiatan tanpa dimulai dengan menyusun rencana, dikemukakan (dalam Amirullah & Budiyono, 2004) perencanaan sebagai suatu proses merupakan suatu cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Berkenaan hal tersebut diuraikan (dalam Amirullah & Budiyono, 2004), proses perencanaan meliputi:

1. Perumusan misi dan tujuan

Kejelasan pemahaman terhadap misi organisasi sangat krusial dalam membantu memilih dan melaksanakan strategi guna mencapai tujuan organisasi.

2. Pemahaman terhadap kondisi saat ini

Untuk mengantisipasi keadaan masa datang maka ditetapkan tujuan melalui

penetapan standar sesuai keinginan, semua ini diperlukan adanya kejelasan mengenai kondisi saat ini, perlu meneliti, mengkaji hal yang relevan sehingga dapat diperkirakan kondisinya pada masa datang.

3. Mempertimbangkan faktor pendukung serta penghambat tercapainya tujuan.

Dalam merumuskan rencana diperlukan deteksi dini terhadap kemudahan dan kesulitan yang mungkin terjadi, organisasi harus dapat menginventarisir hal tersebut.

4. Penyusunan rencana kegiatan dalam mencapai tujuan

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui banyak cara, diantaranya menyusun alternatif, melakukan penilaian terhadap alternatif dan membandingkannya serta berakhir dengan menentukan alternatif terbaik yang akan dipilih.

Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan menurut (Wiludjeng, 2007):

1. Menentukan tujuan
2. Mengembangkan premis
3. Menetapkan alternatif tindakan dan mengevaluasinya
4. Memilih salah satu dari alternatif yang terbaik
5. Menerapkan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasilnya

Menurut (Siswanto, 2011), perencanaan tersusun oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pimpinan untuk memikirkan masa depan dan membuat keputusan saat ini yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang.

Proses perencanaan tersebut menurut (Siswanto, 2011) sebagai berikut:

1. Prakiraan (*forecasting*)

Hal ini adalah suatu upaya dalam meramalkan kondisi pada masa depan dengan menarik kesimpulan dari fakta yang telah jelas diketahui.

2. Penetapan tujuan (*establishing objective*)
Menetapkan tujuan adalah kegiatan menentukan segala hal yang hendak dicapai dengan melaksanakan pekerjaan yang dianggap diperlukan
3. Pemrograman (*programming*)
Hal ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan menentukan:
 - 1) Langkah utama yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan
 - 2) Unit dan anggota sebagai penanggungjawab langkah-langkah dimaksud
 - 3) Urutan dan mengatur waktu dari tiap langkah
 - 4) Penjadwalan (*scheduling*)
Kegiatan ini berhubungan erat dengan menetapkan waktu sesuai rangkaian tertentu untuk melaksanakan beragam jenis pekerjaan
 - 5) Penganggaran (*budgeting*)
Suatu kegiatan dalam menentukan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pekerjaan dalam kurun waktu tertentu
 - 6) Pengembangan prosedur (*developing procedure*)
Merupakan kegiatan normalisasi terhadap metode, cara dan teknik dalam melaksanakan suatu pekerjaan
 - 7) Penetapan dan interpretasi kebijakan (*establishing and interpreting policies*).
Proses ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan syarat berdasarkan keadaan dimana pimpinan dan bawahannya akan bekerja.
Dirumuskan oleh (Puspoprano, 2006b) terdapat enam langkah dalam proses perencanaan, yaitu:
 1. Menyatakan tujuan organisasi.
Fokus dari perencanaan adalah bagaimana sistem manajemen mencapai tujuan organisasi, maka pernyataan dari tujuan diperlukan sebelum tujuan itu sendiri.
 2. Menyusun daftar alternatif.
Ketika tujuan sudah dinyatakan dengan tegas dan jelas, pimpinan perlu menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuan dimaksud
 3. Menyusun premises
Pemilihan alternatif sering ditentukan oleh adanya premise atau asumsi yang dinilai wajar dan relevan.
 4. Memilih alternatif terbaik
Dari banyaknya alternatif yang ada, seorang pimpinan harus memilih alternatif yang dinilai terbaik dan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan.
 5. Menyusun rencana
Penyusunan rencana strategis dan taktis oleh pimpinan perlu dilakukan ketika sudah ditentukan satu alternatif terbaik
 6. Mengubah rencana menjadi tindakan
Rencana harus segera dilaksanakan, jelas bahwa organisasi tidak bisa langsung memperoleh manfaat dari proses perencanaan sampai langkah keenam ini direalisasikan.
(Setiadi, 2008) mengatakan karena ditujukan untuk kepentingan publik, maka prinsip kegiatan perencanaan meliputi:
 1. Kegiatan perencanaan dan segala hasilnya harus diletakkan dalam publik domain yang memiliki makna dapat diakses, dimanfaatkan, dan dipertanggung jawabkan kepada publik.
 2. Informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan harus terjamin kontinuitasnya.
 3. Kegiatan perencanaan haruslah merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak namun tetap mengutamakan unsur keterpaduan.
 4. Pengelolaan pembangunan bersifat terbuka bagi keterlibatan publik.

Pandangan baru pembangunan yaitu penghapusan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Menurut (Sugiarto & Mutiarin, 2017) pandangan baru pembangunan mulai dari proses dalam pelaksanaannya harus mempunyai tiga nilai inti serta tujuan. Menurut (Sugiarto & Mutiarin, 2017) ketiga nilai inti pembangunan adalah : 1) Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*sustenance*); 2) Manusia terhormat dalam bentuk harga diri; 3) Kebebasan (*freedom of servitude*). Adapun tiga tujuan pembangunan adalah: 1) Peningkatan ketersediaan seerta perluasan distribusi barang kebutuhan pokok; 2) Peningkatan standar hidup; 3) Perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu.

Metode (desain) penelitian pada hakekatnya digunakan untuk mengumpulkan, mengukur dan menganalisis data yang dihasilkan dari proses penelitian. Dengan desain, peneliti dapat memperhitungkan sumber daya yang diperlukan tetapi jumlahnya terbatas. Sementara desain itu sendiri menurut (Husein, 2003) adalah “proses antisipasi agar kondisi sesuatu dapat terkendali”.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif, dikemukakan (Sugiyono, 2017): “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”.

Sedangkan menurut pendapat (Nawawi, 2007) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut: “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu prosedur untuk memecahkan permasalahan yang diselidiki tentang gambaran kondisi pada subyek/obyek penelitian”.

Menurut (Agustino, 2008) menjelaskan: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Mengingat tahapan implementasi kebijakan merupakan salah satu titik paling krusial dari sebuah kebijakan, maka perlu diperhatikan aspek yang dinilai dapat menunjang keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan, antara lain adalah model implementasi kebijakan, salah satunya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam (Agustino, 2008):

Yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact of implementation*:

1. Komunikasi, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Dalam komunikasi ini perlu diperhatikan antara lain kejelasan dan konsistensi perintah.
2. Sumberdaya, dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
 - a Staf, ini merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
 - b Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, kedua

informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- c Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan secara politik.
 - d Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal yang perlu dicermati dalam model ini adalah.
- a Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan – kebijakan yang diinginkan pejabat tinggi
 - b Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.
4. Struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur

birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Yang dapat mendongkrak kinerja organisasi antara lain adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), kepatuhan pegawai melaksanakan tugas sesuai SOP dan adanya pembagian tugas yang jelas.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah berkembang dengan pesat, seperti halnya perkembangan teknologi informasi yang sudah semakin maju dan modern. Melalui perkembangan teknologi informasi yang sudah semakin maju diharapkan berbagai aktivitas yang dilakukan dapat berjalan lebih baik, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perumusan atau penyusunan berbagai program kegiatan menjadi semakin mudah.

Seyogyanya hal itu menjadi salah satu gambaran dari sebuah dinas yang dapat dikatakan sebagai leading sektor pada bidang teknologi informasi, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Program kegiatan di dinas ini diarahkan untuk kepentingan kemajuan informasi dan teknologi melalui pengembangan inovasi dan kreativitas yang dapat memberikan manfaat bagi semua sektor.

Terlepas dari hal tersebut, program kerja yang dilaksanakan diawali oleh perencanaan yang disusun dengan melibatkan bidang-bidang yang ada di dinas dengan sekretariat sebagai penggerak utama, perencanaan yang dibuat merupakan sebuah kebijakan yang

harus dilaksanakan dan secara rinci tertuang dalam rencana kerja tahunan.

Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 meliputi program-program: peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, pengembangan komunikasi, informasi dan media masa, pengembangan infrastruktur dan fasilitas TIK, pengelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, keamanan informasi dan persandian dan pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Pembahasan mengenai implementasi rencana kerja tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dianalisis berdasarkan dimensi-dimensi implementasi kebijakan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

1. Komunikasi

Komunikasi secara umum dipahami sebagai kegiatan menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui cara-cara yang dimengerti oleh pihak-pihak yang terlibat.

Proses komunikasi menjadi salah satu unsur penting, melalui komunikasi diharapkan terwujud pemahaman yang jelas dari para pegawai mengenai arah dan kualitas hasil dari kebijakan yang diterapkan, termasuk dalam implementasi berbagai program atau kebijakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, salah satunya adalah rencana kerja tahun 2020.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya, selain sumber daya manusia atau pegawai, anggaran, perangkat dan informasi, sumber daya yang dapat menjadi modal penting dalam suatu organisasi adalah organisasi itu sendiri.

Organisasi sebagai suatu entitas, dengan kemampuan adaptasi dan interaksi yang tinggi dalam mengintegrasikan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi akan membentuk suatu kekuatan dalam kultur kinerja (*performance culture*) sehingga segenap sumber daya dapat fokus pada pencapaian tujuan strategis yang telah digariskan sesuai kebijakan yang akan diterapkan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana menggambarkan suatu keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Keberadaan aparat pelaksana atau pegawai memiliki peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, pelaksana harus mengetahui apa yang akan dikerjakan dan harus memiliki kemampuan dan keinginan untuk menerapkannya.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak dalam suatu organisasi. Kerjasama ini hanya mungkin terdapat dalam birokrasi yang mempunyai struktur yang ideal dengan pembagian tugas yang jelas

dan pedoman kerja yang memadai sesuai ketentuan.

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif dan tidak didukung oleh pedoman kerja yang jelas sebagai acuan pegawai melaksanakan tugas, tidak menutup kemungkinan dapat menghambat terhadap implementasi suatu kebijakan.

B. Pembahasan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers atau pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan itu dipastikan dapat berhasil dalam implementasinya. Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.

Peneliti mencoba menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward bahwa sedikitnya ada empat faktor yang mempengaruhi proses sebuah implementasi kebijakan seperti yang sudah di jelaskan pada bagian sebelumnya dan dihubungkan dengan implementasi kebijakan rencana kerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

1. Komunikasi

Pada hakikatnya berkomunikasi berarti mengalihkan suatu pesan dari satu pihak kepada pihak lain, mengalihkan suatu pesan kepada orang lain dalam komunikasi dapat dimaknai sebagai suatu proses memberikan informasi atau pengetahuan maupun hal-hal lain yang dianggap perlu sehingga menimbulkan kesamaan makna terhadap isi pesan yang disampaikan.

Memperhatikan arti penting komunikasi dalam implementasi kebijakan rencana kerja, menurut

pandangan peneliti hal mendasar yang perlu diwujudkan dalam komunikasi oleh kepala dinas adalah terciptanya saling pengertian atau pemahaman bersama terhadap informasi atau perintah yang disampaikan.

Meskipun informasi atau perintah sudah jelas disampaikan dan dimengerti oleh para pegawai, tetapi tidak tercipta kesamaan pemahaman maka dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan yang dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Pimpinan Lembaga melakukan komunikasi dengan para bawahannya melalui interaksi tidak formal atau melalui acara formal seperti rapat dan lain sebagainya.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan rencana kerja antara lain pegawai, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas yaitu menyangkut kompetensi, perilaku yang tercermin dari kepatuhan terhadap perintah pimpinan atau peraturan, kewenangan sampai fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Keterbatasan jumlah pegawai dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif, penyelesaian pekerjaan mungkin tidak tepat waktu dengan kualitas yang kurang memenuhi standar serta tidak tercapainya target sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja

Sumberdaya yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sangat terbatas baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Disposisi

Disposisi menggambarkan sikap para pelaksana terhadap implementasi sebuah kebijakan, para pelaksana implementasi kebijakan disamping harus memahami mekanisme proses kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai, yang lebih penting adalah memiliki kemauan dan kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam implementasi kebijakan.

Penempatan pegawai sesuai keahlian merupakan salah satu faktor penting supaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, pegawai yang melakukan tugas sesuai keahliannya akan lebih efektif dalam mengerjakan berbagai tugas.

Pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan akan berjalan lebih baik apabila pegawai yang melaksanakan pekerjaan memperoleh insentif khusus, hal ini merupakan motivasi tersendiri bagi para pegawai.

Masih banyaknya pegawai yang ditempatkan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran yang latar belakang Pendidikan dan pengalaman kerjanya tidak relevan sehingga kesulitan dalam menyesuaikan dengan pekerjaan yang dihadapi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan menjadi sangat penting supaya terdapat kejelasan dalam pelaksanaan tugas dan adanya pedoman yang memberikan arah bagi pegawai yang melaksanakan implementasi kebijakan, termasuk di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Dalam sistem birokrasi pemerintahan salah satu landasan dalam melaksanakan tugas pekerjaan antara lain berupa Standar Operasional Prosedur yang umumnya memuat aspek-aspek atau indikator teknis pekerjaan. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman teknis bagi pegawai dalam implementasi kebijakan.

Standar Operasional Prosedur penting bagi setiap pegawai karena merupakan pedoman teknis sebagai dasar alur pelaksanaan tugas pegawai, kegunaan Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasikan.

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor atau variabel yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan, tanpa struktur birokrasi yang baik maka terdapat kemungkinan implementasi kebijakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran akan mengalami hambatan.

Masih adanya SOP pada sebagian tugas menjadikan tidak teraturnya kegiatan yang dijalankan

Dengan kondisi tugas kerja yang cukup berat dan kompleks dengan struktur yang ada kurang mampu beradaptasi dengan beban pekerjaan sehingga beban kerja suatu bagian menjadi menumpuk sedangkan sumberdaya terbatas, hal ini akan menyulitkan dalam pencapaian kinerja yang optimal.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan rencana kerja tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran bisa dibilang cukup berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat variabel atau faktor implementasi kebijakan yang belum optimal, terutama yang berhubungan dengan faktor disposisi, yaitu penempatan pegawai sesuai keahlian dan insentif khusus. Sedangkan untuk faktor-faktor lain relatif sudah cukup baik, meskipun perlu peningkatan pada beberapa aspek seperti pemahaman yang sama dari pegawai terhadap pelaksanaan tugas, pelimpahan kewenangan dan pembagian tugas.

Pada aspek sumber daya jumlah pegawai masih dirasakan belum memadai dan kompetensinya juga perlu lebih ditingkatkan, demikian pula pada aspek komunikasi harus lebih optimal sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Keterbatasan sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran menjadi tantangan dalam Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Tahun 2020.

BIBLIOGRAFI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Badrudin, B. (2015). Dasar-dasar manajemen. In *Dasar-Dasar Manajemen* (Issue 4, pp. 1–141). Alfabeta.
- Brantas, D. (2009). *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- dalam Amirullah, R., & Budiyo, H. (2004). *Pengantar Manajemen*. Badan Penerbit Graha Ilmu, Edisi Kedua, Yogyakarta.
- Djaenur, A. (2012). *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Djatmiko, E. (2005). *Pengaruh Faktor-faktor Keorganisasian Terhadap Prilaku Positif Guru-Guru Ekonomi SMA di Surabaya, Malang dan Jember*. Disertasi PPS UM.
- Fachruddin, A. (2016). *Manajemen Pertelevisian Modern*. Penerbit Andi.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*.
- Husein, U. (2003). *Metode Riset Komunikasi Organisasi* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irwansyah, I., & Rusniati, R. (2012). *Kajian Pengembangan Industri Kerakyatan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin Dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat*.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan ke XXI*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moenir, A. S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*: Jakarta. Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2005). *Manajemen Strategi Yogyakarta*. Gajah mada University Press.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwanti, W. S., & Haryono, B. S. (2015). *Perencanaan Bank Sampah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*. *Reformasi*, 5(1), 149–159.
- Puspoprano, S. (2006a). *Manajemen Bisnis: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PPM.
- Puspoprano, S. (2006b). *Manajemen Bisnis dan Kontemporer*. PPM, Jakarta.
- Saebani, B. A. (2012). *Filsafat Manajemen*.
- Setiadi, N. J. (2008). *Perilaku konsumen: konsep dan implikasi untuk strategi dan penelitian pemasaran*. 1. KONSUMEN, PERILAKU < BR > 2. PEMASARAN, Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran/Nugroho J.

- Setiadi, 2008 (2008), 1–99.*
- Siagian, S. P. (2008). Filsafat Administrasi edisi revisi. *Bumi Aksara, Jakarta.*
- Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 4(2)*, 116–145.
- Silalahi, D. (2003). Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi. *Makalah Bahasan Pada Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM, Denpasar, Bali*, 14–18.
- Silalahi, U. (2002). *Pemahaman praktis asas-asas manajemen.*
- Siswanto, H. (2011). Pengantar Manajemen (Cet. ke-7). *Jakarta: Bumi Aksara.*
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah. *Journal of Governance and Public Policy, 4(1)*, 1–38.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta (Vol. 10).* Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sukowati, P. (2010). *Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.*
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar manajemen.* Prenada Media.
- Terry, G. R. (2003). Prinsip-prinsip Manajemen (Judul asli: Guide to Management). *Penerjemah J. Smith DFM Jakarta: Bumi Aksara.*
- Thahir, B. (2019). Paradigma Dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Media Birokrasi, 175–185.*
- Ulber, S. (2011). Asas-Asas Manajemen. *Bandung: PT Refika Aditama.*
- Wiludjeng, S. (2007). Pengantar Manajemen. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*

Copyright holder :
Thoyib Wahyudin (2021).

First publication right :
Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

